

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAGIAN-A**

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UNIT ORG : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 SATUAN KERJA : (408889) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG  
 PROPINSI : (24) NUSA TENGGARA TIMUR  
 LOKASI : (51) KOTA KUPANG

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2023			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.10.BB	<b>Program Pembentukan Regulasi</b>		151,541,000		151,541,000
	<b>Sasaran Program :</b> Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum				
	<b>Indikator Kinerja Program :</b> Persentase hasil pemantauan dan peninjauan /analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan				
02	02.01 Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan				
02.02	02.02 <b>Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah</b>		151,541,000		151,541,000
5256	<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>				
01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan				
5256.ABD	<b>Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] 24.51 KOTA KUPANG</b>	1.00 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	67,130,000		67,130,000
	<i>Indikator KRO</i>				
	01 Jumlah rekomendasi pemantauan dan evaluasi produk hukum di daerah				
001	<b>Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Daerah</b>	1.00 Rekomendasi Kebijakan	67,130,000		67,130,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Presentase rekomendasi hasil analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan pada tahun sebelumnya yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan pada tahun berjalan				
5256.BDB	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line] 24.51 KOTA KUPANG</b>	1.00 Lembaga, Unit Kerja, Tim	84,411,000		84,411,000
	<i>Indikator KRO</i>				
	01 Jumlah Fasilitas Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah				
001	<b>Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah</b>	1.00 Lembaga	84,411,000		84,411,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Persentase RUU usulan pemerintah dalam Prolegnas Prioritas Tahunan				

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER**  
**RENCANA KINERJA SATUAN KERJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAGIAN-A**

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
UNIT ORG : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
SATUAN KERJA : (408889) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG  
PROPINSI : (24) NUSA TENGGARA TIMUR  
LOKASI : (51) KOTA KUPANG

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2023			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.10.BF	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>		1,623,302,000		1,623,302,000
	<b>Sasaran Program :</b>				
11	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum				
	<b>Indikator Kinerja Program :</b>				
11.01	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum				
11.02	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
11.03	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
11.04	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum				
4841	<b>Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah</b>		1,623,302,000		1,623,302,000
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>				
01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani				
02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang				
03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum				
04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di				
05	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif				
4841.BDD	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat [Base Line] 24.51 KOTA KUPANG</b>	7.00 Kelompok Masyarakat	160,000,000		160,000,000
	<i>Indikator KRO</i>				
01	<i>Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah</i>				
02	<i>Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah</i>				
001	<b>Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum</b>	5.00 Kelompok Masyarakat	121,384,000		121,384,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Jumlah desa/kelurahan binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum				
002	<b>Layanan Penyuluhan Hukum</b>	2.00 Kelompok Masyarakat	38,616,000		38,616,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung kepada masyarakat				
4841.BIC	<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] 24.51 KOTA KUPANG</b>	15.00 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	122,619,000		122,619,000
	<i>Indikator KRO</i>				
01	<i>Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</i>				
001	<b>Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum</b>	15.00 Lembaga	122,619,000		122,619,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Jumlah pengawasan layanan bantuan hukum				
4841.BMA	<b>Data dan Informasi Publik [Base Line] 24.51 KOTA KUPANG</b>	6.00 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	100,633,000		100,633,000
	<i>Indikator KRO</i>				
01	<i>Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif</i>				
02	<i>Jumlah Layanan Perpustakaan di Kantor Wilayah</i>				

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER**  
**RENCANA KINERJA SATUAN KERJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAGIAN-A**

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UNIT ORG : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 SATUAN KERJA : (408889) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG  
 PROPINSI : (24) NUSA TENGGARA TIMUR  
 LOKASI : (51) KOTA KUPANG

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2023			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
001	Fasilitasi JDIHN <i>Indikator RO</i>	5.00 layanan	81,141,000		81,141,000
01	Jumlah Fasilitasi JDIHN di Seluruh Kantor Wilayah				
002	Layanan Perpustakaan Hukum <i>Indikator RO</i>	1.00 layanan	19,492,000		19,492,000
01	Jumlah Layanan Perpustakaan di Kantor Wilayah				
4841.QBA	[SBK] Layanan Bantuan Hukum Perseorangan [Base Line] 24.51 KOTA KUPANG <i>Indikator KRO</i>	135.00 Orang	1,080,000,000		1,080,000,000
01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi <i>Indikator RO</i>	135.00 Orang	1,080,000,000		1,080,000,000
01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi				
4841.QBC	[SBK] Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat [Base Line] 24.51 KOTA KUPANG <i>Indikator KRO</i>	15.00 Kelompok Masyarakat, Kegiatan	160,050,000		160,050,000
01	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi <i>Indikator RO</i>	15.00 Kegiatan	160,050,000		160,050,000
01	Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau Kelompok Masyarakat Miskin				

Kupang, 21 Februari 2023

**Marciana D. Jone, SH**  
 NIP 196411261991032001